

# **TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP JABATAN RANGKAP DI BUMN DAN PERUSAHAAN SWASTA**

**Novi Nauli Nababan**

## **Abstrak**

Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Jabatan Rangkap Direksi dan/atau Komisaris. Suatu Jabatan Rangkap (*interlocking directorate*) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan.

UU No.5 Tahun 1999, yang mengatur perihal Jabatan Rangkap dalam Pasal 26, melarang individu perorangan menduduki jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pada dua perusahaan atau lebih. Skripsi ini membahas mengenai Jabatan Rangkap di BUMN dan Perusahaan Swasta dengan dengan melakukan studi kasus terhadap 2 Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yaitu Putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002 dan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil studi kasus ini diperoleh hasil bahwa 2 putusan KPPU terhadap kasus jabatan rangkap tidak mendapatkan sanksi, sehingga ada kemungkinan munculnya kasus yang serupa.

Kata Kunci : Jabatan Rangkap, praktek monopoli, persaingan usaha

# **DUE JURIDICAL LEGAL REVIEW COPIES AGAINST POSITION IN STATE OWNED ENTERPRISES AND PRIVATE COMPANY**

**Novi Nauli Nababan**

## **Abstract**

One of behavior that can result in monopolistic practices and unfair business competition is Multiple Positions of Directors and / or the Commissioner. A Multiple Occupation (Interlocking Directorate) occurs when the same person sitting in two or more of the board of directors of the company or a representative two or more companies that meet in the board of directors of the company.

The Constitution No.5 of 1999, which regulates about Multiple Positions in Article 26, prohibiting individuals individuals served as members of the Board of Directors and / or Commissioners in two or more companies. This thesis discusses the Occupation Double in SOEs and private company by doing a case study of two Commission Decisions (Business Competition Supervisory Commission) that the Commission's Decision on Case No. 05 / KPPU-L / 2002 and the Commission's Decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2003.

This research, uses normative legal research methods to approach the law. The author uses materials library materials or secondary data and primary data using a qualitative approach. Based on the results of this case study showed that the 2 decision of the Commission against the case does not get penalized another position, so there is a possibility of similar cases.

**Keywords:** Dual Position, monopolistic practices, competition